

Komunikasi Pemerintah dalam Manajemen Anggaran Daerah: Studi Transparansi dan Partisipasi Publik

Diah Fatma Sjoraida¹, Yanti Setianti², Centurion C. Priyatna³

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

³Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

¹diah.fatma@unpad.ac.id, ²yanti.setianti@unpad.ac.id, ³centurion.priyatna@unpad.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif mengenai akuntabilitas anggaran daerah memengaruhi partisipasi publik dalam mengontrol pengelolaan anggaran daerah melalui transparansi anggaran. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat desa yang ada di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024. Variabel yang ada pada penelitian ini adalah variabel eksogen, yaitu variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif, variabel endogen, yaitu variabel partisipasi publik serta variabel moderator adalah variabel transparansi anggaran Pemerintahan Desa. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, analisis data menggunakan metode SEM. Dari hasil penelitian maka simpulan yang ada, bahwa secara parsial variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat, serta berpengaruh terhadap variabel transparansi anggaran Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, variabel transparansi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hasil simultan variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui variabel transparansi anggaran sebagai variabel moderator

Kata kunci: Keterbukaan Informasi, Pesan Anggaran, Media Komunikasi Yang Efektif, Peningkatan Partisipasi Publik, Transparansi Anggaran

1. Latar Belakang

Manajemen anggaran daerah merupakan satu konsep pengelolaan anggaran daerah yang mengandung prinsip keterbukaan, transparansi dan mendorong adanya partisipasi publik secara nyata [1]. Komponen penting dari tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan anggaran daerah [2]. Komunikasi pemerintah merupakan alat penting untuk menjembatani kesenjangan antara keterlibatan publik dan perencanaan anggaran di era informasi terbuka [3]. Namun, berbagai masalah termasuk kurangnya partisipasi publik yang bermakna dan pemahaman publik yang buruk tentang proses penganggaran terus menghambat penerapan komunikasi yang efektif dalam situasi ini [4].

Komunikasi dalam proses pengelolaan anggaran daerah dapat dilakukan dengan menjelaskan peruntukan dana anggaran yang telah disusun terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dimana penyusunan kebijakan ini harus dilakukan proses komunikasi terlebih dahulu kepada masyarakat [5], sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengontrol setiap kebijakan anggaran yang dilakukan Pemerintah [6]. Pemerintah terkadang hanya melakukan komunikasi dan sosialisasi kebijakan terhadap satu golongan tertentu saja, sehingga proses komunikasi tidak menyentuh ke berbagai golongan dan lapisan masyarakat ke bawah yang berakibat tertutupnya informasi mengenai kebijakan Pemerintah terhadap masyarakat luas, sehingga informasi mengenai kebijakan anggaran daerah tidak transparan [7].

Kejelasan pesan anggaran yang disampaikan ke masyarakat seringkali tidak jelas dan tidak memenuhi unsur keterbukaan publik yang membuat proses komunikasi menjadi jelas dan dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dimana pesan anggaran melalui strategi komunikasi Pemerintah akan mencegah terjadinya kebocoran anggaran, dimana anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk meningkatkan pembangunan [23] dan kesejahteraan masyarakat menjadi bias pesannya, sehingga akan merugikan masyarakat, dimana anggaran yang ada tidak mendongkrak perekonomian masyarakat, sehingga dibutuhkan kontrol oleh masyarakat yang merupakan bagian dari partisipasi publik yang ada [9].

Komunikasi yang efektif dan efisien dari Pemerintah memerlukan adanya media komunikasi yang efektif [10], di era digital ini Pemerintah memerlukan komunikasi yang terbuka kepada masyarakat, sehingga

Pemerintah dapat mendorong terciptanya media komunikasi secara digital dalam rangka menciptakan bentuk komunikasi yang terbuka mengenai pesan yang akan disampaikan berkaitan dengan anggaran yang dipergunakan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah daerah melalui media atau saluran komunikasi yang tepat dan efektif untuk mendukung partisipasi publik mengenai kebijakan pengelolaan anggaran Pemerintah [11].

Partisipasi publik yang tinggi terhadap pemahaman informasi mengenai kebijakan pengelolaan anggaran akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap anggaran [12], dimana komunikasi akan semakin terbuka, pesan anggaran dapat tersampaikan dengan baik dan dapat disampaikan melalui media komunikasi yang dapat diterima publik [13], sehingga publik akan dapat mengetahui bahwa anggaran yang dikelola memang benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat [14].

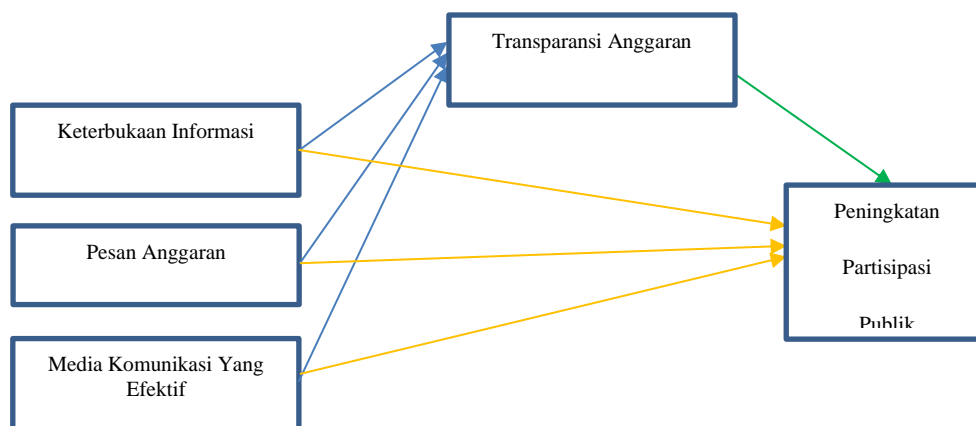
Kabupaten Sumedang merupakan satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah dana desa sebesar 72 triliun rupiah Tahun 2021, 68 triliun rupiah Tahun 2022 yang jumlah dana desanya menurun dibandingkan Tahun 2021. Sedangkan Tahun 2023 jumlah dana desa sebesar 70 triliun rupiah meningkat dari tahun 2023, serta tahun 2024 jumlah dana desa sebesar 71 triliun rupiah meningkat dari tahun sebelumnya [15].

Dana desa yang dikucurkan ke beberapa desa di Kabupaten Sumedang justru mengalami kebocoran akibat korupsi dana kolusi pejabat di beberapa desa, terjadinya korupsi dan kolusi ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan anggaran yang menyebabkan publik atau masyarakat di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sumedang tidak mendapatkan informasi yang terbuka dana tidak menjadi bagian kontrol dari anggaran dana desa, serta pesan mengenai transparansi anggaran yang kurang dilaksanakan dengan baik, dimana Pemerintah Desa tidak menciptakan informasi yang sesuai di media informasi yang kredibel yang menyebabkan terjadinya banyak kasus korupsi penyelewengan dana desa dan *mark up* dana desa yang dilakukan oleh beberapa oknum Kepala Desa dan perangkat desa yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat [16].

Urgensinya penelitian ini disebabkan oleh komunikasi Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Sumedang yang tidak efektif dalam pengelolaan anggaran daerah dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik, serta kurangnya partisipasi publik menyebabkan proses anggaran yang tidak inklusif dan berpotensi bias terhadap kelompok tertentu. Adapun rumusan masalah yang dapat dijabarkan dari penelitian ini adalah bagaimana keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif mengenai anggaran daerah memengaruhi partisipasi publik dalam mengontrol pengelolaan anggaran daerah melalui transparansi anggaran dari pihak Pemerintah Desa yang ada di beberapa desa di Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif mengenai anggaran daerah memengaruhi peningkatan partisipasi publik dalam mengontrol pengelolaan anggaran daerah melalui transparansi anggaran dari pihak Pemerintah Desa yang ada di beberapa desa di Kabupaten Sumedang.

Adapun kebaharuan dari penelitian ini merupakan subjek dari penelitian ini adalah publik atau masyarakat di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024, dimana variabel yang ada pada penelitian ini adalah variabel eksogen, yaitu variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif, variabel endogen yaitu variabel peningkatan partisipasi publik serta variabel moderator adalah variabel transparansi anggaran. Untuk penelitian [17] subjek penelitiannya adalah Pemerintah dan masyarakat Desa Sukamahi Kabupaten Bogor yang dilakukan pada tahun 2020, analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan hanya menjabarkan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor.

Adapun model kerangka konseptual dalam penelitian ini, meliputi:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

1. Keterbukaan informasi berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang.
2. Pesan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang.
3. Media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang.
4. Keterbukaan informasi berpengaruh terhadap transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa di Kabupaten Sumedang.
5. Pesan anggaran berpengaruh terhadap transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa di Kabupaten Sumedang.
6. Media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa di Kabupaten Sumedang.
7. Transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa di Kabupaten Sumedang.
8. Keterbukaan informasi berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang melalui transparansi anggaran sebagai variabel moderator.
9. Pesan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang melalui transparansi anggaran sebagai variabel moderator.
10. Media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang melalui transparansi anggaran sebagai variabel moderator.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui metode *structural equation model* (SEM) melalui *software* PLS 4.0. Menurut [27] analisis SEM adalah analisa data yang menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel, seperti Komunikasi Pemerintah, Transparansi Anggaran, dan Partisipasi Publik. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk atau masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat sebesar 1.220.000 jiwa [28]. Untuk metode pengambilan sampelnya dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Adapun metode *simple random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel [27]. Ini adalah metode sampling paling dasar dan bebas bias (asalkan dilakukan dengan benar), karena pemilihan dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan karakteristik tertentu [29]. Maka jumlah sampel yang muncul dapat dihitung dengan menggunakan rumus slovin, perhitungan sampelnya sebagai berikut:

$$n = N / (1 + Ne^2) = 1.220.000 / (1 + 1.220.000 \times 0.1^2) = 99,99 = 100 \text{ jiwa.}$$

jadi jumlah sampel 100 orang penduduk atau masyarakat yang ada di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan pembagian kuesioner ke responden dan studi dokumentasi.

3. Hasil dan Diskusi

Analisa Convergent Validity

Analisa *convergent validity* adalah komponen validitas konstruk dalam analisis pemodelan persamaan struktural (SEM), yang menilai apakah indikator variabel laten secara akurat mewakili konstruk dan memiliki korelasi tinggi satu sama lain [27]. Adapun hasil *convergent validity* yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Uji *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	Outer Loading
Keterbukaan Informasi (X ₁)	KI 1	0,826
	KI 2	0,811
	KI 3	0,852
Pesan Anggaran (X ₂)	PANG 1	0,855
	PANG 2	0,832
	PANG 3	0,824

	PANG 4	0,870
Media Komunikasi Yang Efektif (X ₃)	MKYE 1	0,865
	MKYE 2	0,843
	MKYE 3	0,835
Peningkatan Partisipasi Publik (Y)	PPP 1	0,846
	PPP 2	0,825
Transparansi Anggaran (Z)	TRANG 1	0,831
	TRANG 2	0,878
	TRANG 3	0,850

Sumber : Hasil Olah Data Dengan PLS 3.0, 2025

Tabel 1 menyatakan adanya sebaran data variabel yang menyebar lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat dijelaskan bahwa sebaran data menyebar secara jelas dan relevan.

Analisa Average Variant Extracted (AVE)

Uji AVE adalah ukuran statistik dalam SEM (*Structural Equation Modeling*) yang digunakan untuk menguji validitas konvergen suatu konstruk laten [27]. AVE menunjukkan seberapa besar varians dari indikator-indikator konstruk yang dapat dijelaskan oleh konstruk tersebut. Adapun nilai *Average Variant Extracted* (AVE) ada pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Uji AVE

Variabel	AVE
Keterbukaan Informasi (X ₁)	0,833
Pesan Anggaran (X ₂)	0,862
Media Komunikasi Yang Efektif (X ₃)	0,877
Peningkatan Partisipasi Publik (Y)	0,824
Transparansi Anggaran (Z)	0,813

Sumber : Hasil Olah Data Dengan PLS 4.0, 2025

Tabel 2 dapat menjelaskan mengenai nilai uji *Average Variant Extracted* (AVE) lebih besar dari 0,5, yang mengindikasikan penyebaran data variabel konstruk sudah sesuai dan dapat menjelaskan anatar satu variabel konstruk terhadap variabel konstruknya.

Analisa Composite Reliability

Uji *Composite Reliability* merupakan hasil uji ukuran reliabilitas internal dalam SEM (*Structural Equation Modeling*) yang menunjukkan seberapa konsisten indikator-indikator dalam mengukur satu konstruk laten [27] misalnya komunikasi pemerintah, transparansi, partisipasi publik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Uji Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Keterbukaan Informasi (X ₁)	0,837
Pesan Anggaran (X ₂)	0,863
Media Komunikasi Yang Efektif (X ₃)	0,854
Peningkatan Partisipasi Publik (Y)	0,844
Transparansi Anggaran (Z)	0,862

Sumber : Hasil Olah Data Dengan PLS 4.0, 2025

Tabel 3 menjelaskan mengenai nilai uji *composite reliability* yang nilainya lebih besar dari 0,6 berarti data yang tersebar sudah layak dan memenuhi persyaratan uji reliabilitas (Hutabarat, Harahap, et al., 2025).

Analisis Discriminant Validity

Dalam analisis faktor konfirmatori (CFA) menerangkan tentang pemodelan persamaan struktural (SEM), analisis validitas diskriminan mengutarakan perbedaan dari setiap variabel konstruk yang ada, dimana hal ini dapat diketahui dan dijabarkan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Analisis *Discriminant Validity*

	Keterbukaan Informasi <i>Moderating Effect</i> 1	Pesan Anggaran <i>Moderating Effect</i> 2	Media Komunikasi Yang Efektif <i>Moderating Effect</i> 3	Peningkatan Partisipasi Publik <i>Moderating Effect</i> 4	Transparansi Anggaran <i>Moderating Effect</i> 5
Keterbukaan Informasi	.766				
Pesan Anggaran	.787	.779			
Media Komunikasi Yang Efektif	.823	.766	.787		
Peningkatan Partisipasi Publik	.766	.823	.779	.791	
Transparansi Anggaran	.791	.787	.791	.766	.823

Sumber: Hasil Olah Data PLS 4.0, 2025

Berdasarkan tabel 5, nilai AVE layak dan sesuai dengan asumsi *Discriminant Validity*.

Pengujian *Path Coefficient*

Adapun uji *path coefficient* dapat dilihat sesuai dengan tabel 6 berikut :

Tabel 6 Uji R Square

Variabel	R Square
Keterbukaan Informasi (X ₁)	0,877
Pesan Anggaran (X ₂)	0,884
Media Komunikasi Yang Efektif (X ₃)	0,837
Peningkatan Partisipasi Publik (Y)	0,878
Transparansi Anggaran (Z)	0,835

Sumber : Hasil Olah Data Dengan PLS 4.0, 2024

Dari tabel 6 yang ada, hasil nilai *R Square* variabel peningkatan partisipasi publik dapat dijelaskan oleh variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran, media komunikasi yang efektif dan transparansi anggaran sebesar 87,8% sedangkan sisanya 12,2% tidak dapat dijabarkan secara mendalam melalui penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dan intepretasinya dapat diketahui melalui tabel berikut ini:

Tabel 7 Uji Hipotesis

	T Value	P Value
KI - PPP	6.517	.001
PANG - PPP	7.352	.002
MKYE - PPP	5.441	.003
KI - TRANG	6.444	.000
PANG - TRANG	8.272	.001
MKYE - TRANG	5.125	.000
TRANG - PPP	4.460	.003
KI - TRANG - PPP	5.743	.001
PANG - TRANG - PPP	7.167	.000
MKYE - TRANG - PPP	4.335	.002

Tabel 8 Intrepretasi Uji Hipotesis

Hipotesis	Pengaruh	T-Statistics	P-Value	Hasil
H1	Keterbukaan informasi terhadap peningkatan partisipasi publik	6,517	0,001	Diterima
H2	Pesan anggaran pegawai terhadap peningkatan	7,352	0,002	Diterima

H3	partisipasi publik Media komunikasi yang efektif terhadap peningkatan partisipasi publik	5,441	0,003	Diterima
H4	Keterbukaan informasi terhadap transparansi anggaran	6,444	0,000	Diterima
H5	Pesan anggaran pegawai terhadap transparansi anggaran	8,272	0,001	Diterima
H6	Media komunikasi yang efektif terhadap transparansi anggaran	5,125	0,000	Diterima
H7	Transparansi anggaran terhadap peningkatan partisipasi publik	4,460	0,003	Diterima
H8	Keterbukaan informasi terhadap peningkatan partisipasi publik melalui transparansi anggaran sebagai variabel mediator	5,743	0,001	Diterima
H9	Pesan anggaran terhadap peningkatan partisipasi publik melalui transparansi anggaran sebagai variabel mediator	7,167	0,000	Diterima
H10	Media komunikasi yang efektif terhadap peningkatan partisipasi publik melalui transparansi anggaran sebagai variabel mediator	4,335	0,002	Diterima

Sumber : Hasil Olah Data Dengan PLS 4.0, 2025

Sesuai tabel di atas dapat menjadi bahan untuk kesimpulan yang ada, bahwa secara parsial variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, serta berpengaruh terhadap variabel transparansi anggaran Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, variabel transparansi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, sedangkan secara simultan variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui variabel transparansi anggaran sebagai variabel moderator.

Keterbukaan Informasi Berpengaruh terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Hasil penelitian menyatakan keterbukaan informasi berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan penelitian [7] yang menyatakan dengan semakin keterbukaan informasi, maka komunikasi yang disampaikan Pemerintah akan cenderung baik dan transparan dan mampu menciptakan partisipasi publik yang cenderung meningkat.

Pesan Anggaran Berpengaruh terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Hasil penelitian menyatakan bahwa pesan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan penelitian [6] yang menyatakan bahwa peran komunikasi dapat menyampaikan pesan mengenai penggunaan anggaran yang dapat diakses dan dijangkau, serta diikutsertakan masyarakat untuk memantaunya agar anggaran terserap dengan baik dan menumbuhkan kegiatan ekonomi yang eksklusif.

Media Komunikasi Yang Efektif Berpengaruh Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Hasil penelitian menjelaskan bahwa media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian [18] yang menyatakan bahwa dengan media yang baik dalam menyebarkan pesan mengenai

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.737>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

penggunaan anggaran dapat membuat beberapa Pemerintah, baik Kota maupun Provinsi dapat dengan mudah menjangkau dan meningkatkan partisipasi publik, karena ada kepercayaan bahwa anggaran dapat digunakan untuk memakmurkan masyarakat.

Keterbukaan Informasi Berpengaruh Terhadap Transparansi Anggaran Pemerintah Desa di Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Menurut hasil penelitian yang ada variabel keterbukaan informasi berpengaruh terhadap transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan penelitian [31] yang menyatakan semakin terbuka informasi anggaran, maka akan semakin transparan penggunaan anggaran dan kebijakan anggaran Pemerintah.

Pesan Anggaran Berpengaruh Terhadap Transparansi Anggaran Pemerintah Desa di Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Menurut hasil penelitian yang ada variabel pesan anggaran berpengaruh terhadap transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian [2] yang menyatakan adanya pesan anggaran yang baik melalui penjelasan rinci anggaran yang ada untuk pembangunan ekonomi masyarakat, maka akan membuat informasi anggaran transparan dan politik anggaran dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Media Komunikasi Yang Efektif Berpengaruh Terhadap Transparansi Anggaran Pemerintah Desa di Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan penelitian [24] yang menyatakan bahwa pemilihan media komunikasi yang sesuai dan dapat ditangkap masyarakat menandakan bahwa pesan dapat sampai, serta akan menciptakan transparansi anggaran secara valid dan relevan untuk proses pembangunan masyarakat menuju masyarakat sejahtera melalui komunikasi politik anggaran yang melibatkan partisipasi publik.

Transparansi Anggaran Berpengaruh Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Transparansi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini selaras dengan penelitian [25] yang menjabarkan bahwa adanya prinsip transparansi pada anggaran yang akan digunakan Pemerintah akan berdampak pada pelibatan masyarakat dan akan membuat masyarakat dapat berpartisipasi agar anggaran tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

Keterbukaan Informasi Berpengaruh Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat Melalui Variabel Transparansi Anggaran Sebagai Variabel Moderator

Hasil penelitian menjabarkan bahwa keterbukaan informasi berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui variabel transparansi anggaran sebagai variabel moderator. Hal ini sesuai dengan penelitian [3] yang menyatakan bahwa semakin terbuka informasi yang ada dalam menjelaskan kebijakan anggaran akan semakin transparan dan akuntabel laporan anggaran dan membuat masyarakat semakin dilibatkan untuk mengawasi anggaran agar tidak digunakan untuk kepentingan individu Pemerintah.

Pesan Anggaran Berpengaruh Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat Melalui Variabel Transparansi Anggaran Sebagai Variabel Moderator

Hasil penelitian menjabarkan bahwa pesan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui variabel transparansi anggaran sebagai variabel moderator. Hal ini sesuai dengan penelitian [4] yang menyatakan bahwa semakin baik pesan yang disampaikan Pemerintah mengenai anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, maka semakin transparan penggunaan dananya dan akan semakin banyak melibatkan masyarakat untuk terus mengawasi anggaran agar pengunaannya benar-benar bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat.

Media Komunikasi Yang Efektif Berpengaruh Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat Melalui Variabel Transparansi Anggaran Sebagai Variabel Moderator

Hasil penelitian menjabarkan bahwa variabel media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui variabel transparansi anggaran sebagai variabel moderator. Hal ini sesuai dengan penelitian [26] yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mengenai penggunaan anggaran meningkat apabila laporan anggaran Pemerintah transparan dan dapat dikomunikasikan melalui media komunikasi yang sesuai dan dapat dipercaya masyarakat.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut maka simpulan yang ada bahwa secara parsial variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat, serta berpengaruh terhadap variabel transparansi anggaran Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, variabel transparansi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, sedangkan secara simultan variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui variabel transparansi anggaran sebagai variabel moderator.

Referensi

- [1] H. Wijayanto, "Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance)," *IJPA-The Indones. J. Public Adm.*, vol. 1, no. 1, pp. 72–88, 2023.
- [2] S. dan H. Hamka, Muh., Nadir, "Politik Anggaran dan Relasi Aktor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah," *J. Polit. Profesi*, vol. 10, no. 1, pp. 79–98, 2022.
- [3] F. Ahda, Muhammad Anif dan Rozi, "Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kapmpar Dalam pengembangan Objek Wisata Ompang Sungai Sonsang," *JOCS J. Commun. Soc.*, vol. 1, no. 1, pp. 14–26, 2022.
- [4] R. Sulistyowati, Rina dan Nataliawati, "Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa," *Own. Ris. J. Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 1798–1811, 2022.
- [5] D. F. Sjoraida, B. Simamora, N. D. M. S. Diwyarhi, Y. Setianti, and S. Aisyah, "Analisa Pengaruh Komunikasi Pemasaran, Electronic Word Of Mouth dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian," *J. EMT KITA*, vol. 8, no. 3, pp. 1769–1776, 2024, doi: 10.35870/jemsi.v10i3.2538.
- [6] Y. N. Nani, "Peran Komunikasi dala Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Gorontalo)," *J. Ideas Publ.*, vol. 7, no. 3, pp. 231–240, 2021.
- [7] E. R. Gemiharto, Ilham dan Juningsih, "Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung," *J. Manaj. Komun.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–22, 2021.
- [8] M. I. Hutabarat, L. Judijanto, R. Ristiyana, M. Syafii, and E. Mediawati, "The influence of accounting knowledge , business experience , work motivation on the use of accounting information in MSMEs," *Int. J. Appl. Financ. Bus. Stud.*, vol. 11, no. 3, pp. 338–344, 2023.
- [9] M. Nur, "Strategi Komunikasi DJPb Mengawal Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025," *Kemenkeu RI*, 2025.
- [10] D. Wahyono, G. J. Windarto, A. Tulim, Y. Suprihartin, and Taryana, "Pengaruh Komunikasi Pemasaran, Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Marketplace Shopee," *JEMSI*, vol. 9, no. 5, pp. 1983–1990, 2023, [Online].
- [11] UMS, "Komunikasi Publik Pemerintah Perlu Lebih Terbuka, Responsif, dan Melibatkan Masyarakat," *ums.ac.id, Surakarta*, 2025.
- [12] M. I. Hutabarat, E. Firmansyah, and A. Siregar, "Operating Cost Against Operating Income, Net Interest Margin, Capital Adequacy Ratio and Loan to Deposit Ratio on Profitability," *Enrich. J. Manag.*, vol. 12, no. 5, 2022.
- [13] D. F. Sjoraida, "Pengaruh Manajemen Komunikasi Politik terhadap Keberhasilan Kampanye Digital," *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 6, no. 5, pp. 1543–1560, 2025.
- [14] U. A. Kurniawan, Agus, Putriani Dewi dan Mustofa, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsew)," *J. Ilm. Keuang. dan Perbank.*, vol. 7, no. 11, pp. 59–69, 2024.
- [15] BPK, "Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025," *bpk.go.id*, 2025.
- [16] Sutrisno, "Oknum Kepala Desa Diduga Mark-Up Dan Manipulasi Anggaran Dana Desa Tahun 2024," *86 News.co*, 2024.
- [17] T. G. B. Nuraeni, Intan dan Kusuma, "Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Pada Tahun 2020)," *J. Manag. Alloc. Village Funds*, pp. 641–656, 2021.
- [18] A. Andhayani, "Sistem Informasi Pemerintahan Darah: e-Budgeting Untuk Menjadikan Akuntabilitas Pemerintah Daerah," *J. Ris. dan Apl. Akunt. dan Manaj.*, vol. 4, no. 2, pp. 183–193, 2020.
- [19] M. I. Hutabarat, "Pengaruh ROA, Pertumbuhan Penjualan, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman di BEI," *Owner*, vol. 6, no. 1, pp. 348–358, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.589.
- [20] M. Fahira, Anisa, Sultan, Mochammad Iqbal dan Akbar, "Perencanaan Komunikasi Reklamasi Pemrov Sulsel dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat Pulu Lae-Lae," *J. Pemerintah. Inov.*, vol. 4, no. 3, pp. 1187–1194, 2024.
- [21] H. dan C. Achmad, Jamarti, Saleh, "Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Timur," *Indones. J. Bus. Manag.*, vol. 2, no. 2, pp. 105–111, 2020.
- [22] M. M. Ramadhani, "Jaringan Komunikasi Politik yang Dipilih Kepala Daerah dalam Proses Perumusan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2019," *Etisal J. Commun.*, vol. 5, no. 1, pp. 134–153, 2020.
- [23] M. I. dan N. Nasution, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Medan," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 9, no. 2, pp. 109–116, 2021.

- [24] dkk Lathifah, Hilma, "Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap kinerja Pelayanan Publik," *J. Komun. dan Adm. Publik*, vol. 11, no. 2, pp. 585–592, 2024.
- [25] U. S. Novitasari, Aprilia dan Iswara, "Penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Papelegi)," *J. Ilmu dan Riset Akunt.*, vol. 13, no. 6, pp. 1–17, 2024.
- [26] R. Batubara, Zakaria dan Risna, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipatif dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkalis," *JAS J. Akunt. Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 95–109, 2020.
- [27] dkk Memon, Mumtaz Ali, "PLS-SEM Statistical Programs: a Review," *J. Appl. Struct. Equ. Model.*, vol. 5, no. 1, pp. i–xiv, 2021, doi: 10.47263/JASEM.5(1)06.
- [28] BPS Kabupaten Sumedang, "Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2024," *sumedangkab.bps.go.id*, 2024.
- [29] M. I. Hutabarat, T. Widiyastuti, Duffin, and N. Ervina, "Analysis of the Influence of the Ability to Prepare Financial Reports, Financial Literacy and Financial Inclusion on the Financial Performance of MSMES," *Ilomata Int. J. Tax Account.*, vol. 5, no. 2, pp. 519–534, 2024, doi: 10.61194/ijtc.v5i2.1170.
- [30] M. I. Hutabarat, S. Harhap, I. Wulandari, and N. Ervina, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan, dan Efektivitas Pengambilan Keputusan terhadap Kinerja UMKM," *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 119–128, 2025, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/153523699.pdf>
- [31] G. Guevarrato, "Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Anggaran," *J. Glob. Partnersh. Soc. Account.*, pp. 1–7, 2024.